

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pemberdayaan

Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengtening*) kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Istilah pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Dr.Zubaedi, M.Ag, M.Pd, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan itu pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung gugat (*accountable*) demi perbaikan hidupnya.<sup>12</sup>

Dalam pengertian diatas , pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup ataupun kesejahteraan setiap individu dan masyarakat antara lain, :

1. Perbaikan ekonomi , terutama kecukupan pangan
2. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)
3. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
4. Terjaminnya keamanan
5. Terjaminnya HAM yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat miskin yang dikemukakan oleh “Blanchard”, ia mendefinisikan bahwa pemberdayaan sebagai upaya untuk menguraikan belenggu yang membelit masyarakat terutama yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, motivasinya.<sup>13</sup> Adapun pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dimana kondisi sekarang tidak

<sup>12</sup> Totok Mardikanto, *Op. Cit*, 28

<sup>13</sup> Elly M. Setiadi, *Op.Cit* , 809

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan dalam menuntaskan kemiskinan dapat juga dilakukan dengan berbagai cara mengubah *mind set* setiap individu ataupun masyarakat untuk berdaya dan mandiri. Pemberdayaan juga dapat dilakukan dengan berbagai aktifitas yang dapat meningkatkan partisipasi individu dan masyarakat.<sup>14</sup>

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman bahwa munculnya ketidak berdayaan masyarakat akibat tidak memiliki kekuatan (*poweless*).<sup>15</sup> Ada beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka:

- a. Kekuatan atas pilihan pribadi
- b. Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri (dalam hal ini yakni kebutuhan pokok dan pangan nya sehari-hari)
- c. Kekuatan dalam kebebasan berekspresi
- d. Kekuatan kelembagaan
- e. Kekuatan sumber daya ekonomi
- f. Kekuatan dalam kebebasan reproduksi

<sup>14</sup> Dr. Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 86.

<sup>15</sup> Dr. Zubaedi, M.Ag, M.pd, *Op Cit*, 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari enam kekuatan diatas tadi, salah satunya ialah kekuatan sumber daya ekonomi yang mana masyarakat miskin harus diberi kekuatan dari segi ekonomi dan kebutuhan pangan untuk bisa melangsungkan hidupnya sehari-hari yakni dengan bantuan pemerintah beras miskin yang membantu menguatkan ketahanan pangan masyarakat miskin di Negara kita. Salah satu metode pemberdayaan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan yakni metode PRA (*Participatory Rapid Appraisal*). PRA ini lebih banyak dilakukan oleh “orang dalam” yang terdiri dari semua *stakeholders* (pemangku kepentingan kegiatan) dengan di fasilitasi oleh orang luar yang mana orang luar berfungsi sebagai fasilitator.

Pemberdayaan ditunjukkan agar klien/sasaran mampu meningkatkan kualitas kehidupannya untuk berdaya, memiliki daya saing dan juga mandiri. Dalam melaksanakan pemberdayaan khususnya kepada masyarakat, agen pemberdayaan perlu memegang prinsip-prinsip pemberdayaan. Adapun prinsip-prinsip pemberdayaan tersebut yakni :

1. Segala bentuk kegiatan pemberdayaan harus didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi klien/sasaran. Hakikatnya, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan potensi di dalam dirinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk aktivitas pemberdayaan.
3. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan.
4. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada

Menurut Ife, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.<sup>16</sup>
3. Aktivitas Ekonomi, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang dan jasa.

Dari teori pemberdayaan masyarakat diatas tadi dapat dirumuskan pemberdayaan masyarakat miskin ialah perbaikan mutu dan kualitas hidup masyarakat miskin dari yang sebelumnya

---

<sup>16</sup> Edi Suharto, Ph.D , *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2014), 59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mempunyai kekuatan menjadi masyarakat yang berdaya dari segi perekonomian dan ketahanan pangan yang dibantu oleh pemerintah melalui beberapa program nasional, salah satu nya program beras miskin.

Adapun yang menjadi tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu ialah : Perbaikan pendidikan, Perbaikan tindakan, Perbaikan kelembagaan, Perbaikan usaha, Perbaikan pendapatan, Perbaikan lingkungan, Perbaikan kehidupan, Perbaikan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dengan sendirinya berpusat pada bidang ekonomi, karena sasaran utamanya adalah memandirikan masyarakat, dimana peran dari ekonomi teramat penting.<sup>17</sup>

## 2. Masyarakat Miskin

Masyarakat menurut Hasan Shadly M.A dalam bukunya yang berjudul “Sosiologi untuk masyarakat Indonesia” memberikan makna masyarakat sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa orang manusia, yang dengan sendirinya bertalian secara golongan secara golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lain.<sup>18</sup>

Dapat diambil kesimpulan masyarakat itu merupakan suatu kumpulan manusia yang bersatu dan hidup menempati suatu

<sup>17</sup> Totok Mardikanto, *Op.Cit*, 290.

<sup>18</sup> Drs. M. Cholil Mansyur SH, *Sosiologi Masyarakat Kota & Desa*, Surabaya : Usaha Nasional), 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah yang memiliki aturan-aturan yang berlaku serta mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama.

Miskin merupakan sebuah keadaan seseorang ataupun rumah tangga yang kekurangan materi, yang biasanya mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari, seperti kebutuhan sandang, kebutuhan perumahan, dan kebutuhan akan pelayanan kesehatan.<sup>19</sup>

Sedangkan kemiskinan menurut kuncoro di definisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makan maupun non makan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan. Garis kemiskinan itu sendiri ialah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makan setara 2100 kalori per orang setiap hari dan kebutuhan non makan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.<sup>20</sup>

Secara umum masyarakat miskin dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok kategori miskin, yaitu golongan miskin sekali (fakir miskin), golongan miskin, dan golongan hampir miskin (rentan miskin). Untuk masyarakat golongan fakir miskin pemerintah sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti bantuan

<sup>19</sup> Elly M. Setiadi, *Op Cit*, 792

<sup>20</sup> Edi Suharto, Ph. D, *Op Cit*, 133-134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program raskin, program bantuan langsung tunai, program beasiswa, program jamkesmas. Dalam realisasinya, bantuan tersebut ternyata tidak mudah. Masyarakat lebih suka mengaku sebagai fakir miskin dengan harapan mendapat berbagai bantuan gratis tersebut. Akibatnya sifat ketergantungan semakin terus meningkat.<sup>21</sup>

Islam sesungguhnya memerangi kemiskinan dengan berbagai undang-undang dan pesannya, lalu berupaya membebaskan orang miskin dari penderitaannya. Sementara itu, fakir miskin tiada lain adalah individu-individu yang kadang-kadang hari ini miskin dan hari esok kaya, sebab berbagai [intu peluang dan kesempatan terbuka terus bagi semua orang

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Quran Surah Al Baqarah ayat 61 :

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِئُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ۖ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Dr. Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 85

<sup>22</sup> Imam Al Ghazali, Lc , Agus Hidayatullah, Lc, M.A, *Al-Quran Tajwid Berwarna dan Terjemahan*, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2014) Hal 9, Juz 1, Surah Al Baqarah (2) ayat ke 61.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Dan (ingatlah), ketika kamu berkata, “Wahai Musa! Kami tidak tahan hanya (makan) dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayor, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah.” Dia (Musa) menjawab, “Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik ? Pergilah ke suatu kota pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta.” Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka (kembali) mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh Nabi tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Dan juga dalam surah lain yakni surah Annur ayat ke 32,

Allah SWT berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>23</sup>

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka Miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui

Dan dalam surah lain Allah SWT juga berfirman

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ بَعْدَ  
عُسْرٍ يُسْرًا<sup>24</sup>

Artinya : Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi harta dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan

<sup>23</sup> Ibid, Hal 354 , Juz 18, Surah An-Nur (24) : ayat ke 32

<sup>24</sup> Ibid, Hal 560 , Juz 28, Surah At-Talaq (65) : ayat ke 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makna dari dalil diatas merupakan orang miskin yang sudah seharusnya dibantu oleh mereka (orang kaya) yang mempunyai rezeki yang berlebih dan berkecukupan. Karena mereka yang miskin ini juga perlu untuk mendapatkan perlakuan hidup yang layak sebagaimana manusia pada umumnya. Dan adapun beberapa indikator orang miskin atau kemiskinan itu sendiri sesuai dengan teori masyarakat miskin diatas tadi ialah :

1. Masyarakat yang memiliki pekerjaan, akan tetapi pekerjaan mereka tersebut memiliki penghasilan yang sangat rendah setiap bulannya atau yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR)
2. Masyarakat yang belum memiliki rumah pribadi atau masih tinggal di rumah kontrakan. Atau yang memiliki rumah pribadi akan tetapi rumah tersebut semi permanen (hanya berdindingan kayu)
3. Masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi untuk bepergian melakukan berbagai aktifitasnya diluar rumah.
4. Masyarakat yang mempunyai tanggungan lebih dari 3 orang anak dalam satu rumah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Program Beras Miskin (Raskin)

#### a. Definisi Beras Miskin (Raskin)

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) adalah Program Nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal, untuk membantu mencukupi ketahanan pangan beras bagi masyarakat yang berpendapatan/berpenghasilan rendah setiap bulannya. Secara horizontal semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin tersebut<sup>25</sup>.

Program raskin merupakan implementasi dari instruksi Presiden tentang kebijakan pemberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan, dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan

---

<sup>25</sup> Pedoman Umum Program Raskin tahun 2015, dari Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat yang berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan dan ketahanan pangan mereka sehari-hari. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis Program Raskin, terhadap pelaksanaan penyaluran Raskin serta pihak mana yang akan bertanggung jawab yang diformulasikan dalam satu panduan yang disebut Pedoman Umum Raskin 2015 (Pedum Raskin 2015). Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan program Raskin secara nasional.

**b. Landasan/Dasar Hukum Program Beras Miskin (Raskin)**

Adapun yang menjadi dasar hukum dibuatnya program beras miskin ini dari pemerintah pusat ialah : Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 pasal 27, Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945, pasal 28 H ayat 1, Undang-Undang Dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(UUD) tahun 1945 pasal 34 ayat (3) Amandemen ke-4, Undang-Undang No.18 Tahun 2002 tentang ketahanan dan kecukupan Pangan, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015, Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG, Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kemudian ada juga Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), lalu Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang PENCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

Lalu ditambah dengan Peraturan Presiden RI tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah, Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota, Pemenkeu tentang Penunjukan Kementerian Sosial Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Raskin, Pemensos No. 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Kepmenko Kesra No. 29 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.

**c. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat dari Program Beras Miskin (Raskin)**

**1. Tujuan**

Adapun yang menjadi tujuan dibuatnya program beras miskin ini oleh pemerintah yakni untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran yang dalam hal ini Rumah Tangga Miskin

**2. Sasaran**

Adapun Sasarannya adalah Rumah Tangga Miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras dengan harga yang sangat murah bila dibandingkan dengan harga beras dipasaran.

Dan yang menjadi sasaran dari program raskin tahun 2015 yang lalu adalah berkurang nya beban pengeluaran sebanyak 15.530.897 (Lima Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh ) RTS (Rumah Tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sasaran) dalam mencukupi ketahanan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg dalam sebulan atau 45 Kg selama 3 bulan.

### 3. Manfaat

Dan berikut merupakan manfaat dari adanya program beras miskin bagi masyarakat miskin :

- a. Dapat meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran penerima manfaat, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Peningkatan akses ketahanan pangan baik secara fisik, maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
- c. Sebagai pasar hasil usaha tani padi.
- d. Stabilisasi harga beras di pasaran.
- e. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/Kg, dan menjaga stok pangan nasional.
- f. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun indikator dari program raskin, adalah sebagai berikut :

- a. Tepat Sasaran : apakah raskin yang disalurkan sudah tepat kepada masyarakat miskin yang perlu diberdayakan ketahanan pangan sehari-hari mereka.
- b. Tepat Jumlah : apakah jumlah beras miskin yang disalurkan kepada masyarakat miskin ini sudah bisa untuk memberdayakan ketahanan pangan masyarakat miskin sehari-hari dalam waktu 3 bulan sekali.
- c. Tepat Waktu : apakah pendistribusian beras miskin tersebut sudah tepat pada waktunya yakni sekali dalam waktu 3 bulan.
- d. Tepat Harga : apakah harga beras miskin yang dijual kepada masyarakat miskin ini sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yakni sebesar Rp.1.600,-/Kg.
- e. Tepat Kualitas : bagaimana bentuk beras yang disalurkan kepada masyarakat miskin apakah sudah layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh mereka masyarakat miskin untuk memberdayakan ketahanan pangan mereka sehari-hari.
- f. Tepat Administrasi : bagaimana sistem pelayanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat miskin tentang program raskin ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Kajian Terdahulu

Adapaun kajian terdahulu dari penelitian saya ini ialah:

1. Penelitian Saudari “ Riri Resha, S.Sos “ mahasiswi jurusan Pengembangan Masyarakat Islam angkatan tahun 2012 dan tamat tahun 2016 yang mna judul skripsi beliau yakni “ Kebijakan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi “.Adapun hasil penelitian Skripsi dari Saudari Riri Resha, S.Sos ini tentang “ Kebijakan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Mudik Ulo Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi “ yakni belum berjalan secara optimal dan maksimal , hal ini dibuktikan dengan tidak adanya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), belum terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan belum juga optimalnya keswadayaan dari masyarakat. Yang menjadi hambatan kebijakan Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui Alokasi Dana Desa ini ialah masih lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan minimnya kegiatan-kegiatan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat.
2. Penelitian saudari “Wahyu Sepmi Sonata, S.Kom.I” mahasiswi jurusan Pengembangan Masyarakat Islam angkatan tahun 2009 dan tamat tahun 2013, yang mana judul penelitian beliau adalah “

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Efektivitas Program Raskin Dalam Memberdayakan Masyarakat Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Adapun hasil penelitian dari Skripsi Saudara Wahyu Sepmi Sonata ini ialah diperoleh korelasi nilai  $r = 0,28$  terdapat dalam rentang nilai  $0,20 - 0,39$  menunjukkan bahwa terdapat nilai korelasi positif yang rendah antara program raskin dalam memberdayakan masyarakat dalam uji signifikan diperoleh  $t$  hitung  $2,28$  dan  $t$  tabel  $2,000$  artinya  $t$  hitung  $> t$  tabel korelasi dalam tahap signifikansi bermakna bahwa terdapat efektivitas program raskin.

### C. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian ini adalah Pemberdayaan Pangan Masyarakat Miskin melalui Program Raskin di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau, sehingga peneliti mencoba mendeskripsikan pemberdayaan dibidang apa saja yang akan dilakukan oleh program raskin ini sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan.

Adapun kerangka pikir pada penelitian tentang pemberdayaan masyarakat miskin melalui program raskin di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ini dapat dilihat dari gambar kerangka pikir dibawah ini.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Raskin**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.